

RELEVANSI MODERASI BERAGAMA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Husni Kamal

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak

Negara dan daerah yang memiliki berbagai keanekaragaman budaya, etnis dan agama memiliki potensi terhadap konflik dan kekerasan, oleh karena demikian diperlukan implementasi moderasi beragama untuk meminimalisir dan juga sebagai jalan tengah di antara berbagai perbedaan demi tercipta lingkungan yang baik, kehidupan yang damai dan kemashlatan negara dan daerah. Dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan studi literatur dan sumber data sekunder yang didapatkan dari buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, buku lainnya, jurnal dan website yang berkaitan moderasi beragama dan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya di interpretasi hasil temuannya sebagai kesimpulan. Adapun kesimpulan relevansi moderasi beragama terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bahwa ada hubungan yang sangat erat antara keduanya yaitu terciptanya stabilitas sosial yang sering terjadi dalam konteks keagamaan, meningkatnya ekonomi dalam suatu daerah sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi karena kondusif, terjadi lingkungan bisnis yang ramah mudah untuk berbisnis dan terciptanya lowongan kerja bagi masyarakat daerah, peningkatan wisata daerah karena keragaman budaya dan kearifan lokal sehingga menarik minat wisatawan yang berdampak pada ekonomi masyarakat daerah, terjalinnya hubungan bisnis yang baik antar suku, etnis dan agama sehingga terbuka peluang usaha untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Daerah.

Abstract

Countries and regions that have various cultural, ethnic and religious diversity have the potential for conflict and violence, therefore it is necessary to implement religious moderation to minimize and also act as a middle way between various differences in order to create a good environment, peaceful life and the welfare of the country and area. This research uses a qualitative type with literature studies and secondary data sources obtained from religious moderation books published by the Ministry of Religion, other books, journals and websites related to religious moderation and economic growth, then interpreting the findings as conclusions. The conclusion of the relevance of religious moderation to regional economic growth is that there is a very close relationship between the two, namely the creation of social stability which often occurs in a religious context, increasing the economy in a region so that it attracts investors to invest because it is conducive, there is a friendly business environment that is easy to do business. and creating job vacancies for regional communities, increasing regional tourism due to cultural diversity and local wisdom so that it attracts tourist interest which has an impact on the economy of regional communities, establishing good business relations between tribes, ethnicities and religions so that business opportunities are opened for economic growth in communities and regions.

Keywords: Religious Moderation, Economic Growth, Regional Economy.



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi moderasi beragama terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sejauh ini, kajian mengenai moderasi beragama sudah mulai banyak diteliti, namun kebanyakan pandangan masyarakat menganggap bahwa moderasi beragama hanya sebatas toleransi beragama dan dampak dari moderasi beragama lebih luas termasuk pada aspek ekonomi. Agama tidak dapat dipisahkan dari semua aspek termasuk pada sisi ekonomi karena Islam mempunyai aturan dalam semua bidang. Agama selalu mempunyai peran dan hubungan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat dengan berbagai keanekaragaman.

Indonesia sebuah negara yang memiliki berbagai etnis, budaya, adat, Bahasa, agama dan aliran dalam suatu agama sehingga sangat berpotensi terhadap terjadinya konflik, baik antar agama, adat dan lain-lain. Dikutip dari viva.co.id bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia suku bangsa terbanyak yaitu terdapat 1.340 suku.¹ Oleh karena demikian, diperlukan upaya untuk menjaga, merawat dan menghargai perbedaan tersebut agar sebuah negara aman dan kondusif. Dalam merawat dan menyatukan cara pandang keagamaan memang sangat berat supaya tidak terjadi konflik dan gesekan di kalangan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2016 melalui Kementerian Agama membuat program moderasi beragama untuk mampu meminimalisir gesekan dan konflik serta agar negara dan daerah-daerah kondusif sehingga masyarakat merasa aman dalam bersosial. Ada beberapa dampak yang terjadi jika tidak kondusifnya sebuah negara dan daerah salah satunya akan berdampak terhadap perekonomian negara dan daerah tersebut.

Moderasi beragama tidak hanya membahas tentang toleransi, ada empat indikator untuk mengukur moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi lokal.² Dengan demikian bahwa ada hal lain selain dari toleransi yang ada dalam moderasi beragama. Secara umum bahwa tujuan dari moderasi beragama yaitu untuk kemajuan bangsa, mencegah kekerasan, menjaga keragaman yang moderat supaya maju dalam bidang kebudayaan,³ dengan menjaga ke-empat indikator tersebut diharapkan akan terjadi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, program moderasi beragama dapat menjadi solusi dalam menengahi berbagai perbedaan budaya, adat, agama dan lain-lain untuk menciptakan keharmonisan dalam sebuah negara dan daerah.

¹ Dedi. Termasuk Indonesia, 6 Negara dengan Suku Bangsa Terbanyak di Dunia, 2022. Retrieved October 16, 2023, from viva.co.id website: <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1473515-termasuk-indonesia-6-negara-dengan-suku-bangsa-terbanyak-di-dunia?page=2>

² Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, Peta Jalan (Roadmap) PENGUATAN MODERASI BERAGAMA Tahun 2020-2024, (Jakarta: Kementerian Agama, 2020). h. 21.

³ Elma Haryani, dkk, Wawasan kebangsaan pada layanan pendidikan keagamaan umat Khonghucu di lembaga Litang Cibinong. *Jurnal SmaRT* 6, no 2 (2020), h 229–244, <https://doi.org/10.18784/smart.v6i>

Moderasi beragama menjadi keharusan terutama dalam sebuah negara yang majemuk, menurut Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama periode 2014-2019 ada tiga setidaknya yang menjelaskan perlunya penerapan moderasi beragama, yang pertama praktik beragama yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, yang kedua bermunculan penafsir agama yang tidak bisa dipertanggung jawabkan hingga berani mengklaim dirinya paling benar dan menyalahkan yang lain, dan yang ketiga beragama yang dapat merusak jalinan kebangsaan seperti politisasi agama.⁴ Ketiga hal tersebut perlu dijaga dan dilakukan deteksi dini untuk menjaga keamanan suatu negara dan daerah, Mantan Kapolri Tito Karnavian menjelaskan bahwa keamanan dan ekonomi mempunyai ikatan yang sangat kuat, jika ekonomi suatu daerah membaik maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga menurun angka kejahatan dan jika keamanan membaik dan kondusif maka investor akan percaya diri untuk berinvestasi di daerah tersebut. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa negara dan daerah yang tidak kondusif dapat terhambat pertumbuhan dan peningkatan ekonomi daerah.⁵

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan studi literatur,⁶ dalam pengumpulan data yang digunakan penelusuran sumber pustaka seperti buku moderasi beragama dari Kementerian Agama, buku lainnya, jurnal dan website yang berkaitan dengan moderasi beragama dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian ini penulis menganalisa relevansi moderasi beragama dengan mengambil empat indikator yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan tradisi lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Selanjutnya penulis menerapkan interpretasi penelitian temuan sebagai pendekatan untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama

Kata moderasi secara bahasa dimengerti sebagai sikap tengah di antara beberapa ekstremitas. Dalam bahasa Arab, moderasi beragama dapat dipahami dengan kata wasathiyah.

⁴ M, Khoeron. *Ini Tiga Kecenderungan Penyebab Pentingnya Moderasi Beragama*, 2021. Retrieved October 3, 2023, from Kementerian Republik Agama website: <https://kemenag.go.id/moderasi-beragama/ini-tiga-kecenderungan-penyebab-pentingnya-moderasi-beragama-b7apr>

⁵ Raditia, Menkeu & kapolri: *Ekonomi dan Keamanan Kunci Penting Kemajuan Indonesia*, 2018, Retrieved October 3, 2023, from Universitas Muhammadiyah Jakarta website: <https://www.umsida.ac.id/menkeu-kapolri-ekonomi-dan-keamanan-kunci-penting-kemajuan-indonesia>

⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak Publisher), 2018.

Kata Wasathan juga terdapat dalam Al-quran disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 143.⁷ Moderat dalam beragama merupakan bersikap luwes, tidak kaku, dan toleran terhadap keberadaan agama lain yang mempraktikkan ajarannya tanpa kehilangan esensi keimanan dalam beragama. Secara umum moderasi atau wasathiyah dapat dijelaskan sebagai jalan tengah, terpusat dan seimbang. Wasathiyah tidak bisa dipisahkan dari kata moderat yang menerapkan nilai humanis-dialogis, menganut nilai persaudaraan daripada kekuasaan, keadilan, menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, dan mencegah perilaku yang ekstremisme.⁸

Selanjutnya Yusuf Qardhawi juga mendefinisikan moderasi dalam Islam yaitu sikap yang selalu berusaha menjadikan jalan tengah dari sikap berlebihan dan berseberangan.⁹ Islam Wasathiyah mengapresiasi dan menjauhi setiap tindakan kekerasan dan radikalisme karena tidak sesuai dengan nilai agama.

Pandangan moderasi beragama tidak hanya diperlukan oleh satu negara melainkan juga untuk dunia untuk menjaga berbagai keyakinan keagamaan dan kebudayaan (multikulturalisme). Moderat dalam beragama merupakan pilar yang penting untuk kehidupan sosial umat beragama. Faktor lain, fanatisme keagamaan sebagai unsur subjektif masing-masing umat beragama juga patut dihargai mengingat tanpa fanatisme pemeluknya, kehidupan agama akan hancur. Pertanyaannya yaitu moderasi yang bagaimana diperlukan untuk kebersamaan dengan penganut agama lain dapat berjalan dengan aman, dan kepemeluk agama atau keyakinan agama masing-masing umat pun tetap terjaga.

Moderasi beragama bukan hanya membahas tentang toleran, namun perlu dirumuskan model toleransi yang lebih baik, untuk kemakmuran bangsa, mencegah tindak kekerasan atas nama agama, adat, budaya dan menjalin sebuah keragaman yang moderat untuk kemajuan negara dan juga untuk pertumbuhan ekonomi. Kementerian agama dalam mengembangkan program moderasi beragama juga mengembangkan nilai dasar kearifan lokal yang terdapat dalam budaya Nusantara. Selain itu, juga perlu pengembangan yang dilakukan dengan mempelajari moderasi beragama dari negara-negara lain, seperti Mesir dalam hal moderatisme agama dan modernisasi lembaga pendidikan dan Kanada dalam hal merawat toleransi beragama dalam konteks negara sekuler.¹⁰

⁷ Nasikhin Raharjo. Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11, no 1, (2022), h 22.

⁸ Ahmad Dimiyati. Islam Wasathiyah: Identitas Islam Moderat Asia Tenggara Dan Tantangan Ideologi. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 6, no 2, (2017), h 139–168. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v6i2.167>

⁹ Dudung Abdul Rohman. *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman di Indonesia* (1st ed.). Bandung: LEKKAS 2021), h. 2.

¹⁰ Muhammad Murtadlo. *Wawasan moderasi beragama di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN)*, (Jakarta, 2021).

Untuk membangun kebudayaan Indonesia ke depan, program moderasi beragama tidak hanya mengambil nilai kearifan lokal, namun juga lebih progresif agar tumbuh kreatifitas untuk mereproduksi dan meningkatkan kemajuan nilai budaya dalam suatu daerah. Oleh karena demikian, untuk membangun semangat moderasi beragama sangat penting untuk diarahkan agar terbentuk nilai dan jiwa beragama yang moderat dalam kontek menilai kreasi budaya kontemporer, seperti sinematografi, design, fashion, tourism, dan yang lain.¹¹

Program moderasi beragama juga wujud dari model berpikir, sikap dan perilaku yang menjurus sebagai jalan tengah atau moderat. Untuk menetapkan tolak ukur moderasi diperlukan referensi dari sumber hukum yang dapat dipercaya seperti teks agama, undang-undang, kearifan lokal masyarakat dan kesepakatan bersama yang dianut dan dipercayai dalam masyarakat dan negara supaya terjaga keseimbangan dalam beragama dengan cara menolak ekstremisme dan liberalisme.

Pemahaman Ekstremisme yang dimaksud disini yaitu sikap yang berlebihan dalam menjalankan sesuatu secara berlebihan tanpa mempedulikan sikap orang lain yang memiliki perbedaan. Selain itu, ekstremisme juga dapat dimaknai dengan paham radikal yang timbul karena pemahaman agama yang masih kurang dan interpretasi yang salah terhadap teks,¹² paham radikalisme ini menjadi tantangan bagi negara, daerah dan juga masyarakat secara umum.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan sikap liberal bisa di artikan dengan cara bersikap yang mengarah, menepikan atau bisa dikatakan menghilangkan nilai agama dalam kehidupan, kebenaran hanya bisa dinilai dari sudut pandang logika sains manusia atau nilai kemanusiaan saja.¹⁴

Pengembangan moderasi beragama perlu dilakukan, Masdar Hilmi menyarankan dalam Pendidikan moderasi beragama diperlukan arahan untuk membangun: ideologi anti kekerasan, berpikir secara rasional, diperlukan pendekatan kontekstual untuk mempelajari agama, penggunaan ijtihad dan menerapkan moderasi beragama di segala bidang seperti demokrasi, sains, teknologi, HAM dan ekonomi.¹⁵ Dengan pengembangan tersebut di atas maka diharapkan akan

¹¹ Muhammad Murtadlo. The development of scientific writing skills in pesantren: A comparative analysis on Ma'had Aly Sukorejo Situ_bondo and Ma'had Aly Manggis Wonosobo. *Analisa Journal of Social Science and Religion* 4, no2, (2019), h. 205–224.

¹² Asep Mahfudz, Menghadapi Tantangan Modernisasi Dengan Mewujudkan Kualitas Manusia Indonesia Melalui Peneguhan Pendidikan Moral. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2 ,no 3, (2016). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.17977/jip.v2i3.2292>.

¹³ Ibnu Hajar Sainuddin, Moderasi Beragama dan Radikalisme di Era Modern. OSF Preprints, (2016) 14–16.

¹⁴ Jefik Zulfikar Hafizd, The Importance of Religious Moderation-Based Islamic Economic Education to the Community for the Realization of Economic Justice in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati Rumah Moderasi Beragama IAIN Syekh Nurjati*, 2 no 1, (2022), h. 97.

¹⁵ Muhammad Murtadlo...h, 12

tercipta masyarakat yang lebih aman, harmonis, menghargai perbedaan dan terjaga kondusif negara dan daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah

Menurut Untoro, bahwa Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam sebuah perekonomian yang dapat mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu masyarakat meningkat serta kemakmuran masyarakat juga mengalami peningkatan.¹⁶ Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Menurut Kuznets yaitu peningkatan kapasitas dalam waktu jangka panjang dari suatu negara dengan adanya kemajuan berbagai kebutuhan barang dan jasa ekonomi untuk masyarakat.¹⁷

Salah satu indikator untuk menilai perkembangan dan kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.¹⁸ Menurut Sirojuzilam bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bersifat multidimensional dan berpengaruh terhadap perubahan seperti struktur ekonomi, perubahan sosial masyarakat, berkurangnya angka kemiskinan, memangkas ketimpangan, dan pengangguran yang ada dalam masyarakat.¹⁹

Selanjutnya menurut Adisasmita untuk memajukan pembangunan suatu daerah atau wilayah diperlukan beberapa hal, seperti sumber daya alam yang baik, sumber daya manusia, investor sebagai pemodal, sarana dan prasarana yang memadai, transportasi sebagai alur distribusi, teknologi yang dibutuhkan, kondisi ekonomi daerah tersebut, kewirausahaan dan dukungan dari pemerintah daerah untuk pembangunan ekonomi.²⁰

Dalam membangun ekonomi suatu daerah perlu diperhatikan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya karena dampaknya juga mempengaruhi pendapatan ekonomi daerah. Salah satu untuk melihat keberhasilan suatu ekonomi dalam negara yaitu meningkat kenaikan aktifitas ekonomi dari tahun sebelumnya dan bertambah produksi barang dan jasa dalam masyarakat.²¹ Selanjutnya untuk mengembangkan ekonomi suatu daerah maka pemerintah mempunyai peran yang sangat

¹⁶ Joko Untoro, *Ekonomi Makro*. (Jakarta: Kawah Media, 2010).

¹⁷ Faisal Fadly, Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16, no 2, (2016), h 64.

¹⁸ Afrizal Tahar dan Maulida Zakhya, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12, no 1, (2011), h 89.

¹⁹ Sirojuzilam. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. (Sumatera Utara: Pustaka Bangsa Press, 2008), H 19.

²⁰ Rahardjo Adisasmita, *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

²¹ Masterplandesia, Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal. 2021. Retrieved October 9, 2023, from Masterplandesia.com website: <https://www.masterplandesia.com/penataan-desa/pemetaan-potensi-ekonomi-lokal/>

utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena demikian diperlukan sebuah pemetaan potensi ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sangat penting seperti dijelaskan oleh Siregar bahwa suatu keharusan dan berdampak langsung kepada masyarakat seperti menurunnya angka kemiskinan.²² Maksudnya bahwa pengaruh dari pertumbuhan ekonomi menyebar di kalangan orang kaya dan miskin, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri lainnya. Oleh karena itu, diperlu kebijakan pemerintah yang strategis baik pusat maupun daerah dan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi daerah untuk memajukan ekonomi karena dengan demikian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya menurut penulis dalam mengambil kebijakan terkait ekonomi, pemerintah daerah perlu memperhatikan keunikan daerah atau kearifan lokal dan juga menggunakan potensi yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan ada hal tersebut maka akan memacu peningkatan ekonomi daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi daerah maka diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan peluang usaha serta lowongan kerja masyarakat. oleh karena demikian, hal ini perlu menjadi pusat perhatian tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat untuk mengambil peluang tersebut.

Relevansi moderasi beragama terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Moderasi beragama dijadikan sebagai salah satu aspek untuk pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan pembangunan nasional, untuk mengukur dan mengevaluasi implementasi dan keberhasilannya Kementerian Agama menetapkan 4 (empat) indikator sebagai sebuah ukuran:²³

1. Komitmen kebangsaan, yaitu salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan penerapan moderasi beragama dengan melihat tingginya penerimaan umat beragama pada kaidah-kaidah berbangsa yang terdapat dalam Undang-undang 1945. Komitmen kebangsaan juga dapat diartikan dengan “cinta tanah air”.

Pembahasan komitmen kebangsaan sangat diperlukan saat ini karena jika diabaikan akan muncul paham-paham baru yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya kebangsaan. Seandainya komitmen kebangsaan tidak diperhatikan dikhawatirkan akan terjadi seperti wacana pembentukan sistem negara baru yang tindak tunduk lagi pada negara dan kedaulatan kebangsaan. Setiap gerakan dan pemikiran yang ingin mengubah sistem negara tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut sudah disepakati bersama oleh pendiri bangsa.

²² Ahmad Sholeh. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekombis Review, 2, no 2, (2014), h 198. Retrieved from <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i2.15>

²³ Tim Kerja Moderasi Beragama..., h 22.

Ada beberapa dampak buruk pada negara dan daerah jika komitmen kebangsaan tidak tercipta dengan baik, yang pertama kekacauan politik sehingga terjadi demo yang anarkis, merusak fasilitas umum dan lain-lain yang berpengaruh pada stabilitas negara, yang kedua gangguan hubungan internasional yang mengakibatkan ketegangan dengan negara lain hingga berdampak pada perekonomian, yang ketiga menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi karena tidak stabil politik dalam suatu daerah, yang keempat menurun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan kelima dapat terjadi isolasi ekonomi dari perdagangan internasional. Oleh karena demikian, pemerintah perlu menerapkan moderasi beragama dalam mengambil kebijakannya.²⁴

Hemat penulis bahwa dalam menjaga komitmen kebangsaan mempunyai tantangan dan pemerintah pun perlu merangkul semua pihak serta membuat kebijakan yang adil disegala bidang termasuk ekonomi terhadap semua daerah agar merasa dipedulikan serta diharapkan tidak terjadi seperti gerakan separatis dan lain-lain. Semua upaya yang ingin menjauhkan komitmen kebangsaan dianggap tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama dan komitmen kebangsaan mempunyai hubungan dengan ekonomi suatu daerah sehingga perlu tekad yang kuat dari pemerintah untuk menjaganya.

2. Toleransi. selanjutnya indikator lain mengukur keberhasilan penerapan implementasi moderasi beragama yaitu tingginya sikap menghormati perbedaan, memberi ruang kepada yang lain pada keyakinannya, menjalankan keinginannya, memberikan ruang berpendapat dan menghargai kesetaraan.

Toleransi merupakan salah satu yang paling disorot dalam moderasi beragama dan juga banyak terjadi kesalahpahaman dengan kata toleransi. Dalam Islam, toleransi (tasamuh) merupakan bagian integral dalam sistem ajarannya, hal ini menandakan bahwa toleransi bukan hal baru dalam ajaran Islam. sedangkan Toleransi dalam sudut pandang agama dan budaya yaitu suatu perbuatan atau sikap yang melarang adanya diskriminasi pada pihak berbeda yang terdapat pada masyarakat.²⁵ Selanjutnya dari sudut pandang ekonomi toleransi bisa terjadi karena faktor laten seperti masalah ekonomi,²⁶ hal ini dikarenakan beberapa konflik yang terjadi dalam masyarakat seperti kalah bersaing ekonomi dengan pihak yang lain sehingga dimunculkan seolah-olah yang terjadi latar belakang agama seperti kasus di Ambon dan didaerah lain.

²⁴ Meylani Anggraini dan Winy Anggraini Putri. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Praktik Moderasi Beragama Di Masyarakat Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10, no 3, (2023), h 1437. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1430-1438>

²⁵ Ismail Pangeran. Toleransi Beragama Sebuah Keniscayaan Bagi Muslim dalam Bermasyarakat. *Al-Misbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 13, no 1, (2017), h 183.

²⁶ Sofiandi dkk. ANTARA EKONOMI DAN TOLERANSI: Membingkai Ekonomi dalam Keragaman. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, 14, no 2, (2022). h 72. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v14i2.20895>

Jika berbagai latar belakang ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan terjalin toleransi yang baik maka akan tercipta berbagai inovasi, seperti di jelaskan oleh Alessina²⁷ bahwa sebuah daerah yang mempunyai berbagai keragaman dapat menghasilkan produk barang dan jasa sesuai dengan latar belakang mereka dan melahirkan berbagai kreatifitas dan muncul peluang-peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi.

Teori di atas juga didukung oleh Ottaviano dan Peri²⁸ bahwa keberagaman dalam suatu daerah mampu meningkatkan nilai manfaat ekonomi, keberagaman jika dapat diatasi dengan baik maka ekonomi akan tumbuh dan tercipta inovasi dari hasil keragaman tersebut. Oleh karena demikian menurut penulis, pemerintah daerah perlu meningkatkan pemahaman toleransi dalam masyarakat agar memahami nilai yang terdapat toleransi dan juga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat dan daerah. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dengan diterapkan sikap toleransi seperti terciptanya inovasi dan kreatifitas untuk menunjang produksi dan terjaga keragaman yang ada dalam masyarakat yang berpotensi konflik.

3. Anti kekerasan, indikator selanjutnya yaitu dengan melihat tingginya penolakan pada aksi individu maupun kelompok yang menggunakan cara kekerasan untuk membuat sebuah perubahan yang diinginkan.

Sikap anti kekerasan yang dimaksud disini yaitu terjadi karena latar belakang gerakan radikalisme dan terorisme. Dalam konsep moderasi beragama, radikalisme dan terorisme bisa dijelaskan sebagai suatu pemahaman yang menggunakan dasar atas nama agama untuk menjalankan tindakan kekerasan dan pembunuhan. Orang yang radikal biasa tidak sabar dengan perubahan yang lambat, mereka cenderung berpikir dengan dasar imajinasi “kondisi seharusnya”, bukan situasi yang senyatanya ada di lapangan.²⁹ Keyakinan ideologi yang mereka yakini bisa berdampak pada sikap emosional sehingga terjadi kekerasan. Menurut penulis bahwa pada dasarnya semua agama tidak membolehkan adanya tindakan kekerasan apalagi sampai terjadi pembunuhan hingga akan berdampak besar pada sebuah konflik yang terjadi di kalangan masyarakat.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya radikalisme seperti faktor keagamaan, politik dan ekonomi. Dalam konsep ekonomi dengan adanya gerakan radikalisme maka turut berdampak pada aksi kekerasan yang akan mempengaruhi keamanan dalam suatu negara dan daerah, selanjutnya dalam konsep ekonomi bahwa seorang investor atau

²⁷ Alberto Alesina, Johann Harnoss and Hillel Rapoport. Birthplace diversity and economic prosperity. *Journal of Economic Growth*, 21, (2016) 101–138.

²⁸ Gianmarco Ottaviano and Giovanni Peri. (2006). The Economic Value of Cultural Diversity: Evidence from US Cities. *Journal of Economic Geography*, 6, 9, (2006), 44.

²⁹ Mukhtar Sarman. *Meretas Radikalisme Menuju Masyarakat Inklusif*. (Yogyakarta: Lkis, 2018).

pengusaha akan berpikir kembali untuk berinvestasi dan membuka usaha pada daerah tersebut. Radikalisme dan ekonomi saling berkaitan, sebagaimana dijelaskan oleh mantan ketua KPK Busyro Muqoddas bahwa jika dalam sebuah negara dan daerah terdapat kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin maka juga dapat berpotensi terjadi konflik dalam masyarakat sehingga muncul paham radikal yang mengatasnamakan agama atau keyakinan lain karena tidak adil dalam ekonomi.³⁰ Selanjutnya juga dikemukakan bahwa kehadiran radikalisme yang timbul karena ideologi sekalipun tidak akan terjadi kekerasan jika pemerintah mampu mengelola kesejahteraan ekonomi merata dan adil.³¹ Diperlukan sikap kehati-hatian pada gerakan radikalisme dan juga perlu diberdayakan ekonomi umat sebagai antisipasi atau untuk mencegahnya.³²

Salah satu tujuan dari program moderasi beragama yaitu untuk meminimalisir kekerasan dengan mengatasnamakan agama karena paham yang ekstrem dalam keagamaan sering memicu konflik dalam masyarakat.³³ Implementasi Moderasi beragama pada masyarakat diharapkan mampu mengurangi permasalahan kerukunan yang dapat memecah umat, memperkuat Pendidikan dan kondusifnya suatu daerah.³⁴ Negara dan daerah yang tidak kondusif akan berdampak meningkatnya angka kemiskinan, melambat pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya investasi. Contohnya Investor tidak akan berani berinvestasi pada negara dan daerah yang rawan terhadap terjadinya konflik karena mereka sangat memperhatikan keamanan dalam berinvestasi untuk menjaga aset mereka.

Oleh karena demikian, menurut penulis bahwa salah satu solusi untuk mencegah dan menangkal terjadinya gerakan radikalisme dalam menjaga keamanan suatu daerah diperlukan kebijakan yang adil dari pemerintah pusat dan daerah terhadap keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Rumah moderasi beragama dalam lingkungan kampus Kemenag, Kepolisian dan lain-lain perlu melakukan deteksi dini untuk mendamaikan pihak yang akan memicu pertentangan dan

³⁰ Busyro Muqoddas. Kesenjangan Ekonomi Suburkan Radikalisme, 2017. Retrieved October 10, 2023, from Universitas Islam Indonesia website: <https://www.uui.ac.id/kesenjangan-ekonomi-suburkan-radikalisme/>

³¹ Imran Tahir dan Irwan Tahir. Perkembangan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12, no 2, (2020), h 78. DOI: <https://doi.org/10.33701/jiapid.v12i2.1360>

³² Mukafi Niam. Ekonomi Rakyat Kuat, Gerakan Radikalisme Susah Masuk, 2015. Retrieved October 10, 2023, from NU Online website: <https://www.nu.or.id/daerah/ekonomi-rakyat-kuat-gerakan-radikalisme-susah-masuk-ThDIx>

³³ Dudung Abdul Rohman..., h 12.

³⁴ Bella Cantika dkk. Pengembangan Ekonomi Umat Terhadap Penguatan Moderasi Beragama Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. *E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, no 2, (2022), h 1241.

meminimalisir terhadap gerakan yang dapat memicu konflik di kalangan masyarakat sebelum berdampak lebih luas.

4. Menerima kebudayaan terhadap tradisi lokal, indikator terakhir dengan melihat tingginya penerimaan dan ramah terhadap tradisi, budaya dan kearifan lokal daerah sepanjang perilaku tersebut tidak bertentangan dengan ajaran inti agama.

Agama dan budaya lokal sering sekali terjadi perdebatan dan perselisihan di kalangan masyarakat, untuk menjembatani pertentangan tersebut bisa di atasi oleh fiqh karena setelah wafat Rasulullah wahyu pun sudah terhenti sedangkan budaya manusia merupakan kreasi dari masyarakat yang selalu bisa berubah dan berkembang. Dalam Islam hukum bersifat dinamis artinya sesuai dengan perkembangan zaman kapanpun. Indonesia terdapat berbagai budaya dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas serta tidak melanggar dengan syariat.³⁵ Sikap keagamaan yang monolak kebudayaan lokal merupakan hal yang kurang baik sehingga nanti akan ada anggapan masyarakat bahwa agama menjadi musuh bagi budaya dan begitu juga sebaliknya budaya menjadi musuh bagi agama.

Dengan adanya berbagai budaya dan tradisi lokal masyarakat yang terdapat di suatu daerah akan mampu menarik minat wisatawan dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar karena dengan adanya budaya tersebut maka akan berpengaruh pada perekonomian daerah. Pengaruh budaya pada pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai tingkat kompleksitas yang cenderung semakin tinggi karena pada hakikat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga bagian dari alur perkembangan budaya.³⁶ Penelitian selanjutnya dijelaskan bahwa kegiatan budaya lokal dalam masyarakat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,³⁷ namun juga ada kearifan lokal yang tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dijelaskan secara ilmu ekonomi.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya implementasi moderasi beragama maka diharapkan dapat terbentuk sikap moderat sehingga masyarakat cenderung lebih mudah dan ramah dalam hal menerima tradisi dan budaya lokal yang berbeda dengan kita sepanjang tidak melanggar dengan dasar agama. Selanjutnya dalam memahami agama tidak harus kaku dengan adanya praktik dan perilaku yang tidak semata-mata

³⁵ Kementerian Agama. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019).

³⁶ Ferdinal Asmin. Budaya dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Kajian terhadap Artikel Chavoshbashi dan Kawan-Kawan. *JURNAL STUDI KOMUNIKASI*, 2, no 2, (2018), h 190–212. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i2.516>

³⁷ Via Fitriana Putri dkk. Sinopsis pengaruh budaya kearifan lokal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten jepara. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 8, no 2, (2020), h 5.

³⁸ Mark Casson, M. (1993). Cultural determinants of economic performance. *Journal of Comparative Economics*, 17, 2, (1993) 418-442.

menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga paradigma kontekstualis yang positif.

Empat indikator diatas menjadi tolak ukur dalam implementasi moderasi beragama di masyarakat, dengan kata lain ketika menerapkan empat indikator tersebut dalam kehidupan sehari-hari maka kita turut membantu mengurangi resiko konflik dan kekerasan antar agama serta aliran dalam suatu agama, meningkatkan budaya daerah dan meningkatkan ekonomi daerah karena kondisi yang stabil dan kondusif.

KESIMPULAN

Implementasi moderasi beragama dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan ekonomi daerah, karena nilai yang terdapat dalam moderasi beragama mampu mencegah intoleransi, menghargai perbedaan keragaman dan menciptakan kondisi daerah yang stabil dan kondusif. Indikator untuk mengukur kesuksesan implementasi moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan menerima budaya lokal yang ada dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai agama. Adapun relevansi moderasi beragama dengan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain yaitu tercipta stabilitas sosial yang sering terjadi dalam konteks keagamaan, peningkatan ekonomi dalam suatu daerah sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi, lingkungan bisnis yang ramah sehingga mudah untuk berbisnis dan terciptanya lowongan kerja bagi masyarakat daerah, meningkatnya wisata daerah karena keragaman budaya dan kearifan lokal sehingga menarik wisatawan yang berdampak pada ekonomi masyarakat daerah, terjalin hubungan bisnis antar suku, etnis dan agama sehingga terbuka peluang usaha untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.

Saran dan Rekomendasi

Penulis mengharapkan pemerintah perlu menerapkan nilai moderasi beragama dalam setiap kebijakan, memberikan sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat supaya memahami dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar serta pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan deteksi dini setiap muncul konflik sebelum membesar yang dapat mengakibatkan kondisi daerah tidak kondusif.

Penulis juga mengharapkan agar penelitian ini selanjutnya lebih dikembangkan terutama terkait pengaruh moderasi beragama terhadap ekonomi di suatu daerah dan membandingkan daerah yang masih tertinggal dengan daerah yang maju guna pengembangan program moderasi beragama di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Tahar, Maulida Zakhiya, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12, no 1, (2011).
- Dimiyati, Ahmad. Islam Wasatiyah: Identitas Islam Moderat Asia Tenggara Dan Tantangan Ideologi. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 6, no 2, (2017), h 139–168. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v6i2.167>
- Sholeh, Ahmad. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekombis Review*, 2, no 2, (2014), h 198. Retrieved from <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i2.15>
- Alberto Alesina, Johann Harnoss and Hillel Rapoport. Birthplace diversity and economic prosperity. *Journal of Economic Growth*, 21, (2016) 101–138.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi penelitian kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak Publisher), 2018.
- Mahfudz, Asep, Menghadapi Tantangan Modernisasi Dengan Mewujudkan Kualitas Manusia Indonesia Melalui Peneguhan Pendidikan Moral. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2, no 3, (2016). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.17977/jip.v2i3.2292>.
- Cantika, Bella, dkk. Pengembangan Ekonomi Umat Terhadap Penguatan Moderasi Beragama Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. *E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, no 2, (2022), h 1241.
- Muqoddas, Busyro. Kesenjangan Ekonomi Suburkan Radikalisme, 2017. Retrieved October 10, 2023, from Universitas Islam Indonesia website: <https://www.uui.ac.id/kesenjangan-ekonomi-suburkan-radikalisme/>
- Dedi. Termasuk Indonesia, 6 Negara dengan Suku Bangsa Terbanyak di Dunia, 2022. Retrieved October 16, 2023, from viva.co.id website: <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1473515-termasuk-indonesia-6-negara-dengan-suku-bangsa-terbanyak-di-dunia?page=2>
- Rohman, Dudung Abdul. Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman di Indonesia (1st ed.). Bandung: LEKKAS 2021).
- Haryani, Elma, dkk. Wawasan kebangsaan pada layanan pendidikan keagamaan umat Khonghucu di lembaga Litang Cibinong. *Jurnal Smart* 6, no 2 (2020), h 229–244, <https://doi.org/10.18784/smart.v6i>
- Fadly, Faisal, Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16, no 2, (2016).
- Asmin, Ferdinal. Budaya dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Kajian terhadap Artikel Chavoshbashi dan Kawan-Kawan. *JURNAL STUDI KOMUNIKASI*, 2, no 2, (2018), h 190–212. <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i2.516>
- Gianmarco Ottaviano and Giovanni Peri. (2006). The Economic Value of Cultural Diversity: Evidence from US Cities. *Journal of Economic Geography*, 6, 9, (2006), 44.
- Sainuddin, Ibnu Hajar, Moderasi Beragama dan Radikalisme di Era Modern. *OSF Preprints*, (2016) 14–16.
- Imran Tahir, Irwan Tahir. Perkembangan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12, no 2, (2020), h 78. DOI: <https://doi.org/10.33701/jiabd.v12i2.1360>
- Pangeran, Ismail. Toleransi Beragama Sebuah Keniscayaan Bagi Muslim dalam Bermasyarakat. *Al-Misbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 13, no 1, (2017), h 183.

- Hafizd, Jefik Zulfikar, The Importance of Religious Moderation-Based Islamic Economic Education to the Community for the Realization of Economic Justice in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati Rumah Moderasi Beragama IAIN Syekh Nurjati*, 2 no 1, (2022).
- Untoro, Joko, *Ekonomi Makro*. (Jakarta: Kawah Media, 2010).
- Agama, Kementerian. *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2019).
- M, Khoeron. *Ini Tiga Kecenderungan Penyebab Pentingnya Moderasi Beragama*, 2021. Retrieved October 3, 2023, from Kementerian Republik Agama website: <https://kemenag.go.id/moderasi-beragama/ini-tiga-kecenderungan-penyebab-pentingnya-moderasi-beragama-b7aprr>
- Casson, Mark. (1993). Cultural determinants of economic performance. *Journal of Comparative Economics*, 17, 2, (1993) 418-442.
- Masterplandes, Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal. 2021. Retrieved October 9, 2023, from Masterplandes.com website: <https://www.masterplandes.com/penataan-desa/pemetaan-potensi-ekonomi-lokal/>
- Meylani Anggraini dan Winy Anggraini Putri. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Praktik Moderasi Beragama Di Masyarakat Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10, no 3, (2023), h 1437. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1430-1438>
- Murtadlo, Muhammad. The development of scientific writing skills in pesantren: A comparative analysis on Ma'had Aly Sukorejo Situ bondo and Ma'had Aly Manggis Wonosobo. *Analisa Journal of Social Science and Religion* 4, no2, (2019), h. 205–224.
- Murtadlo, Muhammad. *Wawasan moderasi beragama di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN)*, (Jakarta, 2021).
- Niam, Mukafi. *Ekonomi Rakyat Kuat, Gerakan Radikalisme Susah Masuk*, 2015. Retrieved October 10, 2023, from NU Online website: <https://www.nu.or.id/daerah/ekonomi-rakyat-kuat-gerakan-radikalisme-susah-masuk-ThDIx>
- Sarman, Mukhtar. *Meretas Radikalisme Menuju Masyarakat Inklusif*. (Yogyakarta: Lkis, 2018).
- Raharjo, Nasikhin. *Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan*. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11, no 1, (2022).
- Raditia, Menkeu & kapolri: *Ekonomi dan Keamanan Kunci Penting Kemajuan Indonesia*, 2018, Retrieved October 3, 2023, from Universitas Muhammadiyah Jakarta website: <https://www.umsida.ac.id/menkeu-kapolri-ekonomi-dan-keamanan-kunci-penting-kemajuan-indonesia>
- Adisasmita, Rahardjo, *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).
- Sirojuzilam. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara*. (Sumatera Utara: Pustaka Bangsa Press, 2008).
- Sofiandi dkk. *ANTARA EKONOMI DAN TOLERANSI: Membingkai Ekonomi dalam Keragaman*. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, 14, no 2, (2022). h 72. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v14i2.20895>

Husni Kamal: Relevansi Moderasi Beragama Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, Peta Jalan (Roadmap) PENGUATAN MODERASI BERAGAMA Tahun 2020-2024, (Jakarta: Kementerian Agama, 2020).

Putri, Via Fitriana, dkk. Sinopsis pengaruh budaya kearifan lokal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten jepara. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 8, no 2, (2020), h 5.